

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA
ANAK LUAR KAWIN**

Nama:

Laily Dwi Setiarini

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Pembimbing :

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra.,S.H.,M.Hum

ABSTRAK

Manusia mengalami peristiwa penting dalam kehidupan terkait dengan kelahiran dan kematian yang adakalanya meninggalkan harta kekayaan merupakan harta warisan, sering menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Surat keterangan hak mewaris menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris. Sampai dalam hal gugatan sesama ahli waris terkait hak waris di pengadilan, antara ahli waris dalam hubungan sedarah, namun terkadang timbulnya gugatan hak waris berasal dari anak luar kawin yang menuntut haknya sebagai hak waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris dan hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder analisis secara deskriptif. Surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi ahli waris namun bagi anak luar kawin yang namanya tidak tercantum dengan alasan perkawinan tidak dicatatkan menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat karena cacat hukum dan batal demi hukum. Kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti berhak atas hak waris dan menjadi ahli waris pengganti ibunya, ahli waris diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun nantinya putusan gugatan anak luar kawin tidak mendapatkan hak dan sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris, karena adanya tindakan pengakuan atau pengesahan. Ketentuan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya, bagi anak yang lahir di luar perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 842 KUH Perdata.

Kata kunci : Surat keterangan hak mewaris, anak luar kawin, hak waris pengganti

**LEGAL STATUS OF INHERITANCE RIGHTS CERTIFICATE
MADE BY THE NOTARY IN THE DIVISION OF ASSETS
CHILD OUT OF MARRIAGE**

Name:

Laily Dwi Setiarini

Master of Notary Law Faculty of Law

Advisor :

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum

ABSTRACT

Humans experience important events in life related to birth and death which sometimes leave assets as inheritance, often causing disputes between heirs. The certificate of inheritance rights is the basis for the distribution of inheritance both for who is entitled and/or how many shares are entitled to be owned by the heirs. Until in the case of lawsuits from fellow heirs regarding inheritance rights in court, between heirs in blood relations, however, sometimes claims for inheritance rights arise from illegitimate children who claim their rights as substitute inheritance rights. This study aims to determine and analyze the legal force of a certificate inheritance rights made by a notary and inheritance rights of illegitimate children as a substitute for heirs. This type of research is normative juridical with a statutory regulation approach. The legal sources used are primary and secondary legal materials for descriptive analysis. A certificate of inheritance rights drawn up by a notary has binding legal force for the heirs, but for illegitimate children whose names are not listed on the grounds that the marriage is not registered, they do not have binding force because they are legally flawed and null and void. The position of a child out of wedlock as a substitute heir is entitled to inheritance rights and becomes the heir in lieu of his mother, the heir is strengthened by the issuance of the Supreme Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. As for the later decision on the lawsuit for children out of wedlock, they do not get the rights and as substitute heirs from the heirs, because of an act of recognition or ratification. Provisions on the legal relationship between children out of wedlock and their parents, for children born out of wedlock, the child only has civil relations with his mother and his mother's family. In accordance with Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 in conjunction with Article 842 of the Civil Code.

Keywords: Certificate of inheritance rights, children out of wedlock, replacement inheritance rights